



SATU TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-KALLA

Aryojati Ardipandanto*)

Abstrak

Dalam satu tahun masa kinerja Presiden Joko Widodo, survei menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang mendapatkan nilai kepuasan tinggi dari masyarakat. Sedangkan menteri yang lain, terutama yang menangani bidang perekonomian, mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan. Terlepas dari kondisi ekonomi global, faktor dinamika perpolitikan atau persaingan politik antara pihak-pihak pendukung dan yang tidak mendukung Presiden Jokowi sebenarnya yang menentukan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus berhati-hati, jangan sampai fokusnya untuk mewujudkan Nawacita menjadi terganggu. Oleh karena itu, faktor konsistensi dalam pencapaian tujuan Nawacita juga akan mendapatkan penilaian penting dari masyarakat.

Pendahuluan

Selama satu tahun bekerja, hanya sejumlah kecil menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) yang dinilai berkinerja baik. Hasil survei *Poltracking Indonesia* menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang memperoleh tingkat kepuasan kinerja tinggi, yaitu: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Selebihnya, 30 menteri dinilai kurang optimal kinerjanya, dengan tingkat kepuasan kurang dari 23%. Survei ini diselenggarakan pada 7 s.d. 14 Agustus 2015 dengan sampel sebanyak 1200 responden, margin error +/- 3% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 1 dan 2 pada halaman berikut.

Menurut Direktur Eksekutif *Poltracking Indonesia*, Hanta Yuda, dengan performa buruk beberapa menteri yang memegang peran dalam perekonomian, sebagian besar responden menghendaki agar Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet (*cabinet reshuffle*).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui produktivitas pemerintah di bidang ekonomi masih perlu diperbaiki. Meskipun demikian, ia juga berdalih bahwa tidak lancarnya situasi ekonomi di dalam negeri lebih disebabkan oleh pelemahan perekonomian global. Hal yang sama ditegaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang turut menegaskan bahwa ekonomi global dan ekonomi domestik sedang mengalami gejolak

*) Peneliti Pertama Ilmu Politik, pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: aryojati.ardipandanto@gmail.com.



Tabel 1. Menteri Berkinerja Baik

No.	Menteri	Puas	Tidak Puas	Tidak Tahu/ Tidak Menjawab
1	Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti	55,7%	13,5%	30,8%
2	Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan	44,5%	15,7%	39,8%
3	Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin	43,2%	15%	41,8%
4	Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa	40,7%	16%	43,3%

Sumber : Koran Tempo, 22 Oktober 2015.

Tabel 2. Menteri Berkinerja Buruk

No.	Menteri	Puas	Tidak Puas	Tidak Tahu/ Tidak Menjawab
1	Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri	9,3%	23,4%	67,3%
2	Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution	10,4%	31,5%	58,1%
3	Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro	10,7%	23,3%	66%
4	Menteri Perindustrian Saleh Husin	10,8%	18,7%	70,5%
5	Menteri Perdagangan Thomas Lembong	12,1%	22,4%	65,5%

Sumber : Koran Tempo, Kamis 22 Oktober 2015

dan kelesuan.

Presiden Joko Widodo sendiri menjelaskan bahwa pemerintahannya selama setahun ini masih dalam tahap membangun fondasi. Dengan banyaknya persoalan fundamental yang harus dibenahi, terlalu dini jika pemerintahannya diharapkan langsung memberikan hasil sesuai dengan janji kampanye.

Kebijakan Terobosan Jokowi-Kalla

Menurut Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, presiden sebetulnya sudah berfokus membangun fondasi ekonomi yang kuat di tengah pelemahan ekonomi dunia. Fondasi di bidang ekonomi itu meliputi pemangkasan birokrasi, pencabutan subsidi BBM, dan pemotongan perizinan yang rumit.

Hal yang tampak menonjol (terutama dalam masa 100 hari pertama pemerintahan) adalah usaha Presiden Joko Widodo dalam menertibkan sektor minyak bumi, begitu ia melantik kabinetnya. Langkah ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo memahami benar bahwa minyak bumi tidak sekedar barang ekonomi melainkan juga sudah menjadi komoditas politik.

Kebijakan berikutnya adalah, Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, jaringan jalan, tol laut, dan sejumlah mega proyek lainnya. Kebijakan peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera, merupakan hal yang patut

diapresiasi.

Di bidang lain, pemerintah juga terus membangun konsolidasi birokrasi agar instruksi dari pusat bisa langsung dieksekusi oleh para aparat di daerah. Untuk mengubah mental seluruh aparat baik di pusat maupun di daerah, tidak bisa dilakukan dengan seketika.

Pengamat politik dari *Charta Politica*, Yunarto Wijaya juga menilai bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla memang sedang dalam tahap membenahi sejumlah masalah fundamental. Oleh karena itu, tantangan terberat Jokowi-Kalla adalah melawan dan menghadapi " arus besar " yang menginginkan pelemahan dalam pemberantasan korupsi.

Di bidang penegakan hukum dan HAM, Presiden Joko Widodo telah memberikan grati kepada sejumlah orang yang selama ini bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), pelaksanaan eksekusi mati terhadap para gembong narkoba yang sudah memasuki tahap kedua, melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan ketentuan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), walaupun belum maksimal, membekukan sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) ilegal, mendukung sepenuhnya langkah KPK memberantas korupsi bersama-sama aparat penegak hukum.

Di bidang politik, walaupun pada awalnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dihadapkan kepada beragam 'gangguan politik' mulai dari "rivalitas yang tidak berkesudahan" antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat

(KIH), namun pada akhirnya Presiden Joko Widodo berhasil mempertahankan terjalannya komunikasi politik dengan parlemen, bahkan ada kecenderungan positif KMP mulai mengurangi tekanan-tekanan politiknya seiring dengan misi pemerintahan Jokowi-JK untuk menyejahterakan masyarakat berjalan pada rel yang benar dan dinilai baik oleh KMP.

Presiden Joko Widodo juga melakukan *reshuffle* kabinet terhadap para menternya yang 'lamban' bekerja dan diyakini *reshuffle* kabinet tidak akan berhenti dilakukan Jokowi sebagai langkah *punish and reward* serta evaluasi terus menerus.

Selanjutnya adalah terkait kedaulatan maritim. Inilah untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia melihat ke laut, kawasan yang selama ini terabaikan. Selama ini laut Indonesia yang meliputi sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia lebih banyak menyejahterakan bangsa lain daripada bangsa Indonesia sendiri.

Tantangan Politik bagi Presiden Joko Widodo

Sejak menempati kursi pemerintahan, Presiden Joko Widodo baru menyelesaikan satu dari tiga tantangan yang dihadapinya. Tantangan yang dimaksud adalah stabilisasi politik. Di bidang politik, Presiden Joko Widodo harus diapresiasi, di mana euforia pertarungan lambat laun mulai di bawah kontrol Presiden Joko Widodo. Kubu oposisi sudah mulai terpecah, mencair, bahkan cenderung hanya Gerindra dan PKS yang jelas memosisikan diri sebagai oposisi. Sisanya sudah abu-abu dan ada yang merapat ke pemerintah.

Akan tetapi, masalah stabilitas politik yang dihadapi justru berasal dari partai politik pendukungnya. Meski memosisikan diri sebagai pendukung pemerintahan, partai-partai tersebut kerap kali berbeda pandangan dengan sang presiden. Kondisi ini membuat publik sempat mempertanyakan kemampuan Jokowi untuk menghadapi kekuatan politik yang dihadapinya. Bukan hanya sekadar mengedepankan integritas bersih yang diusungnya, tapi keberaniannya melawan setiap kekuatan yang jelas-jelas ingin perlemah pemberantasan korupsi.

Setelah itu, tampak bahwa persaingan politik pasca Pilpres lalu belumlah hilang seutuhnya, masih berbekas dan tersisa. Terlebih dalam ranah politik formal institusi kepartaian mengelompok dalam koalisi pro dan kontra pemerintah, dalam analogi Indonesia Hebat dan Merah Putih.

Dapat dilihat bahwa kepentingan sesaat memang menjadi hal yang mencolok, karena kawan dan lawan sulit dibedakan bahkan bisa bertemu untuk kepentingan temporer. Satu yang pasti, presiden tampak mulai bersitegang dengan partai pengusungnya. Kemampuan relasional presiden dengan partai pendukung perlu kembali dibenahi.

Memang pada awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo sudah dihadapkan pada konflik politik di parlemen. Konflik tersebut membelah parlemen menjadi dua kutub politik yang berseberangan, yakni kubu KMP dan KIH. Belum lagi, juga ada konflik di internal Partai Golkar dan PPP yang pada akhirnya juga melibatkan pemerintah untuk menyelesaikannya. Tarik menarik kepentingan politik ini tentu menguras waktu dan energi Pemerintah dan DPR sendiri. Akibatnya, program Pemerintah dan DPR tertunda. Target Pemerintah bersama DPR untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang masih sangat jauh dari target. Namun, konflik yang terjadi di parlemen akhirnya untuk sementara bisa dicairkan dengan berbagai pendekatan politik yang dilakukan oleh Jokowi-JK.

Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK juga dihadapkan pada konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) hingga isu terorisme dan bangkitnya komunisme. Konflik dan isu tersebut turut mewarnai dinamika sosial politik selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Untung saja, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

Keadaan politik di atas tentunya ikut berpengaruh pada kecepatan gerak Presiden Joko Widodo dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya bagi kepentingan masyarakat. Pada aspek jalannya roda pemerintahan, para menteri nampak berjalan cepat, sesuai gerak institusi yang dikelolanya, meski kerap bersinggungan dan bergesekan satu dengan yang lain, memperlihatkan ketidakharmonisan para penyelenggara negara. Tentu, dalam persoalan ini *Leadership Skill* Presiden perlu dikuatkan, mengatur fungsi dan kedudukan para menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan sesuai dengan bidang kerjanya.

Masih terkait kabinet, sebetulnya tidak hanya faktor kinerja menteri yang menjadi sorotan masyarakat, tetapi juga pada siapa yang menduduki jabatan menteri itu. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa penyusunan kabinet tidak semata berdasarkan transaksi politik semata, dengan mengorbankan faktor keahlian

para Menteri itu sendiri di bidangnya, serta *track record* mereka yang baik.

Pada awalnya, Presiden Joko Widodo sebetulnya telah menciptakan sinyal-sinyal kelembagaan ekonomi dan politik yang inklusif kepada masyarakat. Meski dilingkupi aktor-aktor yang tidak bebas kepentingan, Jokowi tetap bergeming memegang teguh prinsip non transaksional. Dalam tradisi politik transaksional, proses pencalonan presiden, maka orang-orang ataupun partai politik pendukung yang masuk dalam lingkaran tim kampanye bisa dipastikan mendapatkan jatah/posisi menteri, jabatan ataupun konsesi ekonomi lainnya. Semuanya sebagai timbal balik/balas budi atas jasa merebut kursi kepresidenan. Namun Presiden Joko Widodo tidak menerapkan tradisi tersebut. Presiden Joko Widodo sangat selektif dan cerdas memilih calon-calon pembantunya dengan melacak *track record* hingga pada catatan transaksi rekening orang yang digadang akan menjadi menteri dalam jajaran kabinatnya. KPK dan PPATK dijadikannya sebagai lembaga yang akan membantunya menfilter kebersihan calon menterinya dari perkara korupsi. Cara ini cukup efektif untuk mengurungkan ambisi para koruptor masuk dalam lingkaran kuasa kepresidenan tanpa “ngasorake” orang-orang yang dulu mendukungnya dalam proses pilpres.

Namun, dalam perkembangan terakhir, dalam penentuan jabatan menteri, Presiden Joko Widodo tampak seperti terjebak dalam politik transaksional. Presiden terlihat dalam kondisi dilematis dan tersandera baik oleh parpol pendukungnya sendiri bahkan kepentingan wakilnya sendiri. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ekspektasi publik agar menteri yang diangkat bisa bekerja secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Penutup

Ke depan, Presiden Joko Widodo harus lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi politik yang terutama bertujuan untuk melemahkan kinerja Presiden dan Kabinetnya. Meskipun banyak gangguan-gangguan politik yang akan memperlambat kinerja, Presiden Joko Widodo harus berkonsentrasi untuk tetap berfokus pada pewujudan Nawacita sebagaimana yang pernah dikampanyekannya. Masyarakat tentu akan menilai kinerja Presiden Jokowi tidak hanya dari kecepatan gerak politiknya saja, tetapi juga pada konsistensinya dalam mencapai perwujudan Nawacita.

Di pihak lain, DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam sistem Presidensiil di negeri ini harus terus mengedepankan prinsip *check and balances* dalam hubungannya dengan Pemerintah. Kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo harus terus dimonitor, yang mana hal ini adalah untuk kepentingan tercapainya janji-janji kampanye politik Presiden Joko Widodo pada pilpres, yang intinya terangkum dalam program Nawacita. Untuk mengawal proses pemerintahan secara efektif, DPR RI harus bersatu, dan itu berarti bahwa dikotomi antara KMP dan KIH sebetulnya sudah menjadi tidak relevan lagi.

Referensi

Koran Tempo, Kamis, 22 Oktober 2015.

Banyak Tantangan, Pengamat : Setahun tak Cukup untuk Wujudkan Harapan Rakyat : <http://www.solopos.com/2015/10/20/1-tahun-jokowi-jk>, diakses 20 Oktober 2015.

Survei Poltracking: Setahun Pemerintahan Jokowi Tidak Ada Perubahan, <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/20/11512111/Survei.Poltracking.Setahun.Pemerintahan.Jokowi.Tidak.Ada.Perubahan>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

Temuan Survei Nasional Poltracking Indonesia Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK Meneropong Kinerja Menteri Kabinet Kerja, http://poltracking.com/images/content/pdf/PEMAPARAN_SURVEI_NASIONAL_OKT_2015.pdf, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

Pengamat : Reshuffle Sarat Kepentingan Politik, http://portalkbr.com/stefanno_reinard_sulaiman/05-2015/pengamat__reshuffle_sarat_kepentingan_politik/70759.html, diakses 21 Oktober 2015.

Teten : Setahun Jokowi-JK Fokus Bangun Fondasi, dinikmati 3-4 Tahun ke depan, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/10/20/346777/teten-setahun-jokowi-jk-fokus-bangun-fondasi-dinikmati-3-4-tahun-ke-depan>, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

Kekuatan dan Kelemahan Pemerintahan, <http://indonesianreview.com/prof-dr-emil-salim/kekuatan-dan-kelemahan-pemerintahan-jokowi-1>, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

Presiden Jokowi Beri Grasi untuk Lima Tapol di Papua, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi, diakses tanggal 22 Oktober 2015.